



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : UID LAMPUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I GEDE AGUNG SINDU PUTRA
2. Jabatan : GENERAL MANAGER
3. NHK : 194475

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 7.908.000.000

1. Tanah Seluas 208 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 1.040.000.000
2. Tanah Seluas 370 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 1.850.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 222 m2/70 m2 di KAB / KOTA
BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.610.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/180 m2 di KAB / KOTA
GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.456.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/150 m2 di KAB / KOTA
TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.952.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 965.000.000

1. MOBIL, HONDA CRV 1.5 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
375.000.000
2. MOBIL, MISHUBISI PAJERO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
590.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 78.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.010.195.675

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 9.961.195.675

III. HUTANG

Rp. 215.553.393

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 9.745.642.282



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.